BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 kecamatan dengan 351 desa. Secara geografis, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka di bagian utara, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran di bagian timur, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Garut di bagian Barat (sumber: <https://www.tasikmalayakab.go.id>).

Pemilihan desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya sebagai objek penelitian adalah karena Kabupaten Tasikmalaya mendapat pujian atas pengelolaan dana desanya. Analisis APBN PKAKN BK DPR RI, Teuku Surya Darma menyatakan bahwa dana desa Kabupaten Tasikmalaya telah dikelola dengan baik dan tepat sasaran, hal ini dibuktikan dengan perkembangan BUMDes-nya. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Tasikmalaya telah menerima dana desa sebesar Rp 1,33 triliun, yang mana setiap tahunnya Kabupaten Tasikmalaya menerima transfer dana desa sebesar Rp350 miliar yang telah disalurkan ke 351 desa, dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (DPR RI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dan dijalankan mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah desa atas pengelolaan dana desanya (Widyatama et al., 2017). Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki BUMDes bersama terbanyak yang dimiliki oleh kabupaten dan kota yang berada di Priangan Timur. Jumlah BUMDes di kabupaten dan kota di Priangan Timur akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah BUMDes Bersama Kabupaten dan Kota di Priangan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes Bersama
1.	Kabupaten Ciamis	35
2.	Kabupaten Garut	33
3.	Kabupaten Pangandaran	11
4.	Kabupaten Sumedang	25
5.	Kabupaten Tasikmalaya	37
6.	Kota Banjar	1

Sumber: Open Data Jabar (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-des-berdasarkan-status-badan-usaha-milik-des-bumdes-bersama-di-jawa-barat>)

Table 1.1 menunjukkan jumlah BUMDes di kabupaten dan kota yang berada di Priangan Timur. Dapat diketahui bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki BUMDes bersama terbanyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Priangan Timur yang lainnya. Table 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki 37 BUMDes bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dijalankan dengan baik dengan memperhatikan analisa dan identifikasi risiko atas keputusan yang akan diambil.

1.2 Latar Belakang

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan desa-desa di Republik Indonesia. Tujuan ini didukung dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang ditransfer pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan program pembangunan desa, besaran dana desa yang salurkan ke desa disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Dana desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota mengalami peningkatan jumlah, yang artinya pemerintah terus memberi dukungan finansial untuk program pembangunan desa di seluruh negeri.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus memaksimalkan peranannya dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memastikan informasi keuangan diberikan secara terbuka kepada masyarakat, serta memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan demi menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hardiningsih et al., 2019). Sama halnya dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa bertanggungjawab dalam mengelola dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan prinsip pengelolaan dana desa yang baik, transparan dan

akuntabel. Tanggung jawab dan keberhasilan aparat desa dalam mengelola dana desa dibuktikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020).

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban yang berbentuk pertanggungjawaban yang diberikan serta penerapan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, Supadmi & Suputra (2018) mendefinisikan pengelolaan dana desa sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala Desa) dengan berpedoman pada kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa. Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah menjadi nilai yang sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peranan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah (Widyatama et al., 2017).

Kabupaten Tasikmalaya telah mendapatkan apresiasi atas kemampuannya mengelola dan mengalokasikan dana desa yang diterimanya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan korupsi dana hibah yang dilakukan oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya membuat Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Dian Pornomo melaporkan kerugian yang dialami negara atas korupsi dana desa yang dilakukan Kepala Desa Cibalanarik, Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp253.224.922. Penilaian Wajar Dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh beberapa hal terkait penyajian laporan keuangan daerah yang harus dibenahi dan diperbaiki. Termasuk ke dalamnya aset, kesesuaian sistem akuntansi pemerintah, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, hal yang masih harus diperbaiki dan dibenahi adalah sistem pengendalian internal, khususnya pada sistem pengendalian belanja hibah. Pendapat lain ditambahkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rahmat, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga disebabkan oleh penurunan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang disorotinya adalah tingkat kerapian dalam tata kelola dan tata administrasi. Hal ini juga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 dan 2020 yang harus ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya meskipun mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dilakukannya penindaklanjutan adalah untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban penilaian tersebut.

Selain itu, dari seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Priangan Timur, Kabupaten Tasikmalaya menjadi Pemerintah yang mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam waktu dekat dan masih berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayahnya. Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di wilayah Priangan Timur akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kabupaten Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Kabupaten Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kabupaten Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Tasikmalaya	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
6.	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Laporan Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan komunitas partisipasi (Amaliya & Maryono, 2022), kompetensi aparatur pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat (Pahlawan et al., 2020), kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal (Atiningsih & Ningtyas, 2019), penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas pada laporan keuangan (Natawibawa et al., 2019), sistem pengendalian internal pemerintah, sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia (Yulisa et al., 2019), penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah (Jatmiko et al., 2019), kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan (Supadmi & Suputra, 2018), kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat (Mada et al., 2017), sistem pengendalian internal (Widyatama et al., 2017), kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi anggaran (Sugiyono, 2021)(Sugiarti & Yudianto, 2017), sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan audit keuangan daerah (Suprihastini & Santoso,

2017), sistem pengendalian internal dan kinerja manajerial pemerintah daerah (Kewo, 2017). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti adalah kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kompetensi aparatur pengelola dana desa dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan alasan karena aparatur pengelola dana desa merupakan komponen utama dalam pengelolaan dana desa. Aparatur pengelola dana desa harus memiliki kompetensi yang memenuhi, agar dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, sistem pengendalian internal dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan alasan karena sistem pengendalian internal berperan penting dalam setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan alasan karena pemanfaatan teknologi informasi yang tepat mampu membantu aparatur pengelola dana desa dalam menyusun laporan pengelolaan dana desa dan meminimalisir kesalahan penyajian yang dikarenakan *human error*.

Faktor penelitian pertama yang akan dibahas adalah kompetensi aparatur pengelola dana desa. Penelitian Widyatama et al. (2017) menyatakan bahwa kunci utama untuk mencapai pengelolaan dana desa yang maksimal ada pada kompetensi yang dimiliki oleh pengelolanya. Kompetensi memiliki makna dasar sebagai cakap, mampu, atau terampil (Widyatama et al., 2017). Kompetensi aparatur pengelola dana desa sangat berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena, aparatur pengelola dana desa yang kompeten mampu mengelola dana desa secara maksimal, serta melaporkan hasil pengelolaannya sesuai regulasi yang berlaku. Dengan begitu, kewajiban mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan dana desa dari tahap awal hingga akhir terpenuhi, sehingga pengelolaannya memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) dengan hasil penelitian

menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Widyatama et al. (2017), hasil menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Faktor penelitian kedua yang akan dibahas adalah sistem pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dilakukan Amaliya & Maryono (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik sistem pengendalian internalnya baik, maka semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian internal selalu memastikan bahwa pengelola dana desa memperhitungkan serta menganalisis risiko terhadap keputusan yang diambil. Pimpinan Instansi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memperhitungkan dan menganalisis risiko dari setiap keputusan yang diambil. Bukti nyata dari kehati-hatian ini adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Widyatama et al. (2017) dikatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa, hal ini berperan penting dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah desa. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Pahlawan et al. (2020), hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor penelitian terakhir yang akan dibahas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi diartikan sebagai teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi. Sumber daya pengelola dana desa yang kompeten, kinerjanya akan lebih maksimal apabila mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Kendala-kendala dalam pelaporan keuangan daerah akan terselesaikan oleh adanya teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan tepat dan maksimal. Dengan begitu, laporan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan rendah salah saji. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi didesain sedemikian rupa agar mudah digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal mampu mempercepat pengumpulan data, menyiapkan data yang dibutuhkan, menyimpan data yang telah diolah, memproses data menjadi sebuah informasi, mengumumkan, menganalisis, sampai dengan menyebarkan informasinya. Hal ini akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiarti & Yudianto (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Pahlawan et al. (2020), hasil menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan dan adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022).”

1.3 Perumusan Masalah

Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah menjadi nilai yang sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peranan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah (Widyatama et al., 2017). Namun, aparatur pengelola dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan korupsi dana hibah desa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya gagal meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal-hal yang disoroti atas penilaian ini adalah beberapa hal terkait penyajian laporan keuangan daerah yang harus dibenahi dan diperbaiki. Termasuk ke dalamnya aset, kesesuaian sistem akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta sistem pengendalian internal yang masih harus diperbaiki dan dibenahi, khususnya pada sistem pengendalian belanja hibah. Hal ini berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 dan tahun 2020 harus ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya meski telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun di atas dan adanya, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Pertanyaan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022?
2. Bagaimana kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022?
 - b. Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022?
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.
 - b. Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasar hasil dari penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.1.5 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberpengaruhan kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti di bidang serupa. Serta menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

1.1.6 Aspek Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi di bidang akademik dalam bidang kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematis penulisan tugas akhir ini berpedoman pada Keputusan Dekan Universitas Telkom Nomor KD.0034/AKD9/EB-DEK/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta menjelaskan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, mengikutsertakan penelitian terdahulu yang serupa dan menjadi sumber referensi, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, operasional variabel yang diuji pada penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas data, serta teknik analisis uji data yang digunakan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan karakteristik dari responden, hasil penelitian, serta membahas hasil penelitian. Secara berurutan, yang akan dibahas adalah hasil penelitian, interpretasi dari hasil, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Sub-bab kesimpulan menyajikan jawaban dari pertanyaan penelitian. Sub-bab saran menguraikan keterbatasan penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan